



## Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perkembangan Partai Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia

Lidia Kristiani Situmorang<sup>1</sup>, Humayah<sup>2</sup>, Tsany Khalisha Khairiyah<sup>3</sup>, Pitri Ayuningsih<sup>4</sup>, Rinjani Edelweiska<sup>5</sup>, Putri Yulyanti<sup>6</sup>, Zahrotul Husna<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

---

### Abstract

Received: 17 Oktober 2024

Revised: 24 Oktober 2024

Accepted: 31 Oktober 2024

*In Implementation of Pancasila Values in the Development of Political Parties and General Elections in Indonesia. Currently, the values of Pancasila are often underestimated and are no longer understood in depth, in fact the Indonesian people and citizens only know and only know formally that Pancasila is a basis whose values are of very high and noble value because it is not without the reasons and excuses of its predecessors. initiated Pancasila as the basis of the state. Pancasila is expected to become a reference and basis for the Indonesian state's steps in the future. However, currently Pancasila only has 5 principles which are the basis and are not studied by Indonesian citizens themselves. Therefore, with this research, researchers want to see the extent to which successful political parties participate in respecting and understanding the values of Pancasila and implementing these Pancasila values. With this research aims to find out: 1. implementation of Pancasila values in the development of a political party, 2. The role of Pancasila in the world of politics, Political Parties in interpreting Pancasila principles in policies and agendas in the Prosperous Justice Party, 3. Prosperous Justice Party The real. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The results of this research show that: 1. In implementing the values of Pancasila, it plays an important role in the world of politics in Indonesia, 2. Pancasila influences voters' views on voting in general elections, 3. The Prosperous Justice Party has implemented its agenda and authority.*

**Keywords:** Pancasila. General elections, Political parties.

(\*). Corresponding Author: [lidiasitumorang038@gmail.com](mailto:lidiasitumorang038@gmail.com)

**How to Cite:** Situmorang, L. K., Humayah, H., Khairiyah, T. K., Ayuningsih, P., Edelweiska, R., Yulyanti, P., & Husna, Z. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perkembangan Partai Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14487848>.

---

## PENDAHULUAN

Implementasi merujuk pada penerapan atau pelaksanaan suatu konsep, rencana, atau kebijakan ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks Indonesia, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan partai politik dan pemilihan umum mengacu pada bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam regulasi, praktik politik, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, termasuk pemilu. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti penegakan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi pemilu, kampanye yang mengedepankan persatuan, serta keterlibatan masyarakat dalam pemilu sebagai wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemilu yang mencakup penerapan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi pemilu, kampanye yang mengedepankan

persatuan, serta keterlibatan masyarakat dalam pemilu umum sebagai wujud penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua regulasi pelaksanaan pemilihan umum harus mengacu pada nilai dan norma yang terdapat pada Pancasila. Pemilu merupakan salah satu reformasi dari sistem demokrasi di negara Indonesia dan mencakup penerapan nilai-nilai Pancasila.

Nilai implementasi Pancasila dalam perkembangan politik dan pemilu di Indonesia sangat penting dalam menjamin agar proses politik dan demokrasi berjalan sesuai dengan falsafah negara. Pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu perubahan dari sistem demokrasi yang dianut negara, sejalan dengan amanat sila keempat Pancasila.

Implementasi Pancasila dalam politik Indonesia dan pemilihan umum tercermin dalam berbagai aspek, termasuk dalam pembentukan kebijakan, partisipasi masyarakat, dan nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin dan partai politik. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memberikan landasan untuk membentuk sistem politik yang inklusif, adil, dan demokratis. Implementasi Pancasila dalam politik Indonesia tidak selalu berjalan tanpa kontroversi atau tantangan. Beberapa isu seperti korupsi, polarisasi politik, dan ketidaksetaraan masih menjadi perhatian, dan upaya terus dilakukan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila guna mencapai tujuan negara yang lebih baik.

Sebagai ideologi negara, Pancasila bukan hanya sekadar doktrin filosofis, tetapi juga menjadi panduan utama dalam pembentukan dan operasional partai politik serta pelaksanaan pemilihan umum di tanah air.

Pancasila, yang merangkum nilai-nilai gotong royong, persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan ketuhanan yang maha esa, menjadi landasan moral dan etika bagi kehidupan berpolitik di Indonesia. Sejak kemerdekaan, para pendiri bangsa dengan sungguh-sungguh mengakui pentingnya Pancasila sebagai fondasi yang kuat untuk membangun negara yang adil dan demokratis.

Pancasila bukan hanya semata-mata simbolisme konstitusional, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai kultural yang dihayati oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks partai politik, keberpihakan terhadap Pancasila menjadi suatu kriteria penting. Partai politik yang ingin eksis dan berperan dalam sistem politik Indonesia diharapkan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam visi, misi, dan programnya.

“Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut belpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.” (Labolo dan Teguh Ilham, 2015)

“Pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.” (Ibnu Tiicahyono, dalam Labolo dan Teguh Ilham, 2015)

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pelepasan dari sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia dan mencakup penerapan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan ideologi dan falsafah berbangsa dan bernegara yang menjadi pemersatu dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita guna. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia penting untuk

memastikan bahwa proses pemilihan umum dilakukan dengan transparansi, akurat, dan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memilih pemilih yang akan mewakili mereka.

Pemilihan umum di Indonesia, sebagai pilar demokrasi, turut melibatkan peran Pancasila dalam menentukan arah pembangunan negara. Pancasila memberikan arah yang jelas terkait dengan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat. Partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum diharapkan mempresentasikan diri sebagai agen perubahan yang konsisten dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam setiap adanya pemilihan umum Masyarakat tentunya perlu memiliki sikap yang optimisme karena melalui peningkatan kesadaran dalam berpolitik akan menumbuhkan pelaksanaan pemilu yang baik. Tidak hanya Masyarakat yang perlu memiliki sikap seperti itu, melainkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana memiliki peran yang sangat penting saat diadakannya pemilihan umum yang dimana KPU harus berpedoman pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas, dalam Santoso, Rudi (2019).

Pemilu merupakan pilar bagi demokrasi negara yang penyelenggaraannya untuk mewujudkan kedaulatan dan rakyat dapat memberikan hak suara untuk memilih ataupun dipilih. Selain itu, Penyelenggaraan pemilu juga merupakan bagian dari sarana integrasi bangsa, mengenal satu sama lain, dan menghargai satu sama lain. Nilai-nilai Pancasila, seperti demokrasi, keadilan, dan persatuan, menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Pancasila sangat memegang peran sentral dalam dunia politik Indonesia sebagai panduan nilai dan filosofi negara. Sebagai dasar ideologis, Pancasila memberikan landasan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan beradab. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial membentuk fondasi demokrasi yang diterapkan dalam sistem politik. Seiring waktu, peran Pancasila dalam perkembangan partai politik dan pemilihan umum terus berkembang. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik mengharuskan adaptasi konstan terhadap nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan mampu menjawab tuntutan zaman. Oleh karena itu, memahami sejarah dan evolusi peran Pancasila dalam konteks politik Indonesia merupakan langkah krusial untuk menyikapi dinamika partai politik dan pemilihan umum di masa depan.

Permasalahan lain dalam sistem partai adalah belum optimalnya kinerja fungsi partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat. Dalam suatu negara fungsi partai politik meliputi pembentukan pemerintahan yang efektif dan partisipasi politik dalam pemerintahan pada saat itu. Sementara itu, dalam melayani rakyat fungsi partai politik yaitu memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Saat ini, sebagian besar partai politik belum sepenuhnya menerapkan pendidikan politik dan rekrutmen politik yang efektif, yaitu melakukan rekrutmen untuk melatih pemimpin yang mempunyai kapasitas politik.

## **METODE PENELITIAN**

Pada Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini penulis mengumpulkan data-data melalui wawancara dan mencari sumber referensi melalui beberapa acuan buku dan jurnal. Penulis melakukan penelitian ini dengan sumber yang valid dan fakta berdasarkan apa yang terdapat pada dan acuan buku serta jurnal dengan tujuan untuk mencapai terlaksananya penelitian ini.

”Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.” (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan setting alamiah yaitu, anggota DPD PKS Kota Serang. Melalui sumber data yang didapatkan, dengan ini pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, yaitu dengan mendapatkan informasi secara langsung dari sumber atau informan yang relevan. Penelitian menggunakan data ini mendapatkan informasi langsung mengenai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perkembangan Partai Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia. Informasi langsung dari narasumber atau informan yang relevan. Peneliti menggunakan data guna mendapatkan informasi secara langsung mengenai implementasi sekolah penggerak dalam membentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan partai politik dan pemilihan umum dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jelaskan Wawancara dilaksanakan di Gedung DPD PKS Kota Serang dengan narasumber M. Readhil Ilham selaku Wakil Bendahara PKS dan Suhenda selaku Staff Stariat DPW PKS. Berdasarkan wawancara didapatkan hasil sebagai berikut:

### **Peran Pancasila Dalam Dunia Politik**

Politik dapat diartikan sebagai proses pembentukan keputusan dalam masyarakat, termasuk dalam pembuatan kebijakan dan tindakan terkait pemerintahan negara. Pancasila sangat berperan penting dalam politik di Indonesia. Politik di Indonesia berlandaskan pada dasar negara yaitu pancasila. Pancasila memiliki peran dalam perkembangan politik di Indonesia dari era orde lama hingga era reformasi saat ini.

Pancasila memainkan peran penting dalam ranah politik di Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dalam pembangunan lembaga negara, perlindungan hak asasi manusia, praktik demokrasi, dan sistem hukum. Misalnya, Pancasila menjadi pedoman bagi pembangunan lembaga-lembaga negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa, serta menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan pelaksanaan demokrasi. Terlebih lagi, Pancasila menjadi landasan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama dalam negara Indonesia. Hal ini juga memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan antara beragam aspek agama, politik, sosial, dan budaya bangsa.

Pancasila memiliki peran krusial dalam politik Indonesia sebagai landasan falsafah negara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan dan regulasi politik. Nilai-nilai seperti ketuhanan yang

Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat, menjadi pijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan politik. Implementasi Pancasila dalam politik hukum Indonesia sangat penting untuk mencegah konflik sosial, rendahnya toleransi, dan puncak politik identitas. Oleh karena itu, Pancasila bukan sekedar ideologi politik, melainkan juga pandangan hidup yang harus diintegrasikan ke dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia.

Pancasila adalah dasar negara dan tumpuan langkah negara Indonesia di dalam sila sila Pancasila adalah hal hal yang menjadi tujuan negara dan Pancasila sendiri memiliki peran penting dalam bidang politik Indonesia karena politik berperan penting untuk negara dan Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara. Sebagai pandangan hidup dalam bernegara, Pancasila menjadi landasan bagi perencanaan dan pembentukan kebijakan dan regulasi politik, segala halnya harus di sesuaikan dengan nilai nilai.

Pancasila juga berperan dalam menjaga stabilitas politik dan keberagaman di Indonesia. Prinsip persatuan dan kesatuan menggambarkan upaya dalam memelihara kerukunan antar-etnis, agama yang sangat beragam dan berbeda dan juga dihiasi beragam budaya dalam tubuh NKRI. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai identitas nasional yang menghimpun dan merangkul masyarakat Indonesia yang beragam perbedaan begitu pun Dalam ranah politik, Pancasila menjadi dasar tumpuan untuk membangun sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kedaulatan rakyat.

Nilai-nilai pancasila tercermin dalam platform dan program partai politik. Visi misi partai berlandaskan pada ideologi pancasila, dimana nasionalisme menjadi fundamental serta keberagaman budaya dan lain sebagainya sudah menjadi ciri khas dalam berpolitik. Contohnya anggota partai tidak hanya yang beragama Islam, keberagaman tidak menjadi penghalang untuk bersikap rukun.

Pancasila juga berperan dalam menjaga stabilitas politik dan keberagaman di Indonesia. Prinsip persatuan dan kesatuan mencerminkan upaya untuk memelihara kerukunan antar-etnis, agama, dan budaya dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai identitas nasional yang mempersatukan masyarakat Indonesia di tengah perbedaan. Dalam ranah politik, Pancasila menjadi acuan untuk membangun demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kedaulatan rakyat.

Nilai-nilai pancasila tercermin dalam platform dan program partai politik. Visi misi partai berlandaskan pada ideologi pancasila, dimana nasionalisme menjadi fundamental serta keberagaman budaya dan lain sebagainya sudah menjadi ciri khas dalam berpolitik. Contohnya anggota partai tidak hanya yang beragama Islam, keberagaman tidak menjadi penghalang untuk bersikap rukun.

Banyak pihak yang menganggap partai politik sebagai faktor terpenting dalam demokrasi, sehingga menjadikannya sebagai pilar penting dalam melembagakan sistem politik demokrasi. Partai politik, pemilu, dan badan perwakilan merupakan tiga lembaga yang tidak dapat dipisahkan dalam negara demokrasi modern. Partai politik mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, yang merupakan sarana bagi warga

negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menentukan pemimpinnya. Di Indonesia, perkembangan partai politik sangat pesat sejak jatuhnya rezim otoriter, dan mereka memainkan peran penting dalam transisi demokrasi di negara ini. Namun banyak juga masyarakat yang memiliki pandangan skeptis terhadap partai politik, karena pada kenyataannya, partai politik seringkali dimanfaatkan oleh sekelompok elit penguasa sebagai sarana politik atau untuk memuaskan “keinginan” mereka sendiri. Partai politik hanya berfungsi sebagai alat segelintir orang beruntung yang mampu memanipulasi suara masyarakat untuk memaksa diambilnya kebijakan publik tertentu.

Partai politik memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Namun, masih banyak masalah yang dihadapi dalam kehidupan berpolitik di Indonesia, seperti rendahnya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik dan kurangnya persahabatan dari para elite politik. Oleh karena itu, partai politik di masa transisi ini harus mengisi ruang publik dengan program-program pendidikan politik yang sehat dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik masih rendah dan perlu adanya perubahan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Baliho, spanduk, dan poster tokoh politik sering digunakan sebagai alat komunikasi politik yang efektif untuk membangun keberterimaan dan keberpihakan masyarakat terhadap partai politik. Oleh karena itu, partai politik harus memaksimalkan pendidikan politik dan memenuhi kewajibannya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Partai politik haruslah memiliki program yang jelas dan tujuan yang jelas untuk membantu peningkatan pemahaman mengenai pendidikan politik masyarakat, menghubungkan kelompok-kelompok kepentingan dan sosialisasi politik, serta membangun sosialisasi politik dan komunikasi politik untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa partai politik belum mampu hadir dan memberikan pendidikan politik yang membantu mengsosialisasi dan memadai kepada masyarakat. Oleh karena itu, partai politik di saat ini masih dalam masa transisi ini harus mengisi ruang publik dengan program-program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat terkait politik yang sehat dan memberikan contoh dan implementasi yang baik kepada masyarakat. Implementasi Program pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi banpol, baliho, spanduk, dan poster tokoh politik yang tentunya memuat konten yang bermutu. Selain itu, partai politik juga harus memaksimalkan pendidikan politik dan memenuhi kewajibannya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Beberapa program pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia meliputi program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan program peningkatan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Partai politik juga harus mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat menjadi perekat persatuan bangsa. Namun yang terjadi justru sebaliknya: partai

politik dan elite politiknya justru memperburuk keadaan dengan manuver politiknya. Kebijakan moneter (monetary policy) berlangsung di sejumlah bidang. Orang-orang yang paling bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter adalah mereka yang mewakili partainya, baik itu direktur, anggota, atau pendukung. Biasanya penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemerintahan juga ikut serta dalam kebijakan moneter ini.

Lahirnya partai politik juga merupakan salah satu bentuk implementasi bentuk kebebasan mengemukakan pikiran, gagasan, pendapat, dan keyakinan dalam masyarakat demokratis. Maka, keberadaan partai politik erat kaitannya dengan prinsip kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkumpul. Terdapat tiga prinsip kemerdekaan atau kebebasan yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dengan jelas menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Partai politik, sebagai kelompok kekuatan masyarakat yang diatur dengan undang-undang, memiliki peranan yang menentukan dalam dinamika penyelenggaraan negara. Dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara, partai politik berperan penting dalam menjaga kelangsungan demokrasi dan menghargai peran masyarakat dalam proses pemilihan dan pengambilan kekuasaan. Dalam pemerintahan demokratis, salah satu perwujudannya adalah dengan adanya partai politik. Setelah partai politik, berikutnya adalah peraturan pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain berlandaskan pada Pancasila visi misi dibangun sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. Partai politik memahami dan menginterpretasikan sila sila Pancasila dalam kebijakan serta agenda partai seperti dalam kebijakan apapun yang dibuat atau diusulkan sifat dari eksekutif itu mengusulkan tetapi eksekusi ada di eksekutif. Usulan yang disampaikan tentu berlandaskan pada Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara merupakan kunci dalam membangun keharmonisan kehidupan beragama, politik, sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat majemuk. Pancasila juga merupakan sumber moralitas politik dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, yang mengharuskan kekuasaan negara dijalankan menurut standar tertentu, seperti legitimasi kerakyatan atau legitimasi demokrasi. Selain itu, nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam segala bidang kehidupan karena bersifat universal, mencakup pengembangan lembaga-lembaga negara, perlindungan hak asasi manusia, dan berfungsinya demokrasi dan sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk dan mengatur dunia politik Indonesia.

Pancasila memengaruhi pandangan pemilih terhadap pemilihan, pemilih tentunya akan memilih pemimpin yang sesuai dengan kriterianya dan sesuai dengan Pancasila. Dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila tentu ada tantangannya, namun tantangan itu dapat dilewati dengan adanya kerja sama antara satu sama lain dalam sebuah partai.

Peran Pancasila dalam politik sangatlah beragam, karena tidak hanya memberikan pedoman moral bagi negara tetapi juga mempengaruhi perkembangan

etika sosial, termasuk etika politik. Hal ini dianggap sebagai filosofi konsensus yang mewujudkan komitmen moral bangsa Indonesia. Terlebih lagi, status Pancasila sebagai dasar hukum negara Indonesia mempunyai dampak yang luas terhadap berbagai aspek pemerintahan, termasuk sistem hukum dan upaya mewujudkan keadilan sosial. Dengan itu, hubungan antara Pancasila dan politik merupakan hal mendasar untuk memahami kerangka etika dan hukum negara Indonesia.

Pandangan terhadap pancasila terkadang ada yang utuh dan tidak utuh. Polarisasi muncul bisa dari top down ke top up dan up ke top down, polarisasi juga bisa terjadi tergantung dari kepala negara. Cara mengatasi polarisasi politik yaitu bagaimana kepala negara harus memiliki sikap yang netral dalam hal apapun yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam sebuah demokrasi asas tertinggi adalah kekuasaan, bagaimana orang yang ada dalam kekuasaan tersebut mereka memiliki sifat netral. Hal tersebut yang susah terjadi karena orang yang masuk dari sebuah kekuasaan itu bagian dari partai masing-masing dan polarisasi di Indonesia itu akan terjadi. Hanya saja yang seharusnya mengambil sikap yaitu para politisi agar apa yang mereka gagaskan atau yang mereka buat tidak menjadi pemecah belah bangsa.

Partai politik ikut berperan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Partai PKS menjalankan peran sebagai partai keadilan sejahtera dimana harus bersikap pro terhadap masyarakat. Contohnya seperti harga kebutuhan pokok semakin naik dan kita harus memperjuangkan dengan cara kontribusi dan memberikan data kepada pemerintah bahwa ada beberapa kebijakan yang dianggap kurang tepat. Fungsi partai politik atau legislator dalam negara demokrasi ada tiga yaitu mengatur, mengontrol dan anggaran. Tiga hal tersebut harus menyesuaikan dengan UUD 1945.

### **Peran Pancasila Dalam Partai Keadilan Sejahtera di Kota Serang, Banten**

Dalam penelitian ini, peneliti telah mewawancarai beberapa anggota dari Partai Keadilan Sejahtera yang berada di Kota Serang, bertempat di Kantor DPD PKS (Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera) yang beralamat di Jalan Ayip Usman No. 01, Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang, Banten. 42113. Dalam partai PKS Pancasila sangat berperan penting. Sudah jelas, bahwa Pancasila dan Undang-undang menjadi dasar acuan Partai. Partai PKS sudah memenuhi tugas dan wewenang dan wewenang partai PKS fokus kepada legislative, guna dalam pemenuhan unsur dari legislative yaitu sudah terpenuhi seperti controlling, budgeting kepada pemerintah, dan di bagian eksekutif sudah dijalankan yaitu dengan mengkritisi anggaran yang tidak pro terhadap rakyat dan lain-lain.

Pancasila memiliki peran penting dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kota Serang, Banten, sebagai dasar ideologi dan panduan nilai untuk menjalankan kegiatan politik dan sosial. PKS, sebagai partai Islam, menekankan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka ajaran Islam untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki peran dalam pendidikan politik dan pembinaan kader yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Partai ini menanamkan dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum kaderisasi kepemimpinan, serta aktif melakukan pembinaan karakter terhadap anggotanya

berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Meskipun demikian, sikap PKS terhadap Pancasila sebagai dasar negara masih tetap terjadi, dengan pandangan yang beragam terkait dengan penerimaan atau penerapan syariat Islam.

Contoh Partai PKS Kota Serang sudah memenuhi tugas dan wewenang, yaitu saat mengkritisi terkait Undang-undang Omnibus Law (Undang-undang yang disahkan tidak pro terhadap rakyat).

PKS juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam program-programnya, seperti program pemberdayaan masyarakat, program kesejahteraan sosial, dan program pendidikan. PKS juga aktif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam praktiknya, PKS juga mengajak seluruh kader dan anggotanya untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pelatihan kepada kader dan anggota partai mengenai nilai-nilai Pancasila dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Partai PKS tentu saja memiliki program kerja yang berkaitan dengan Pancasila dan bukan hanya berbicara mengenai bela negara saja, melainkan berbicara mengenai kesosialan, sandang, pangan dan yang lainnya hal-hal tersebut sudah partai PKS jalankan dan kerjakan dengan semestinya.

Negara maju dan berkembang tentu berbeda terutama dalam hal demokrasi yaitu dalam negara maju masyarakat sudah memiliki calon yang akan dipilih dengan yakin, mereka akan membiayai segala sesuatu yang berhubungan dengan kampanye pilihannya sedangkan dalam negara berkembang berbanding terbalik.

Mencegah kericuhan dalam pemilihan pada intinya adalah tidak ada yang memantik pertikaian maka tidak akan ada perpecahan entah itu dari pejabat ataupun dari masyarakat yang akan memilih. Pola pikir yang dimangun dari demokrasi hanyalah sebagai satu tujuan, bukan hal yang utama. Pada dasarnya yang utama adalah bagaimana kita mencapai tujuan tersebut dengan keamanann UUD 1945, yang mengatur semua hal terkait dengan masyarakat dan didalam demokrasi itu juga memberikan sebuah keamanan serta kenyamanan disebuah negara.

Agar tidak terjadi kecurangan dalam proses pemilihan umum yaitu meningkatkan keamanan dari penyelenggara pemilu. Karena jika tingkat keamanan kurang maka akan mudah untuk melakukan tindakan kecurangan, biasanya disebut dinamika demokrasi. Dalam negara Indonesia tingkat kecurangan dalam pemilihan sudah bisa diminimalisir serta sudah meningkatkan keamanannya. Surat suara yang telah terkumpul dan telah dihitung di TPS akan dibawa ke kelurahan lalu ke kecamatan (pengesahan ditingkat pertama) setelah itu dibawa ke kabupaten, provinsi lalu sampai di nasional dengan rentan waktu 14 hari. Kecurangan dalam pemilihan akan ditangani oleh basis c1.

### **Mengenai Partai PKS**

Narasumber yang peneliti dapatkan, yaitu Bapak Readhil Ilham. Ia mengatakan bahwa saat pertama kalinya ia terjun ke dunia politik, yaitu berawal sejak menjadi mahasiswa diajarkan mengenai controlling, budgeting dan training. Saat menjadi mahasiswa bapak Readhil pernah menjabat sebagai Wakil Presma (Presiden Mahasiswa) di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2015. Pada

akhirnya setelah lulus tertarik masuk politik faktor lain yang memengaruhi yaitu adanya senioritas, yang awalnya hanya membantu pada akhirnya diberi amanat untuk mengelola anggaran. Bapak Readhil suka dengan atmosfer politik di Indonesia ada klise da nada duplikasi. Ia bergabung di PKS sejak tahun 2020.

Anggaran partai politik berasal dari APBD, hitungannya yaitu perolehan suara yang didapat saat selesai pemilu, PKS sendiri mendapatkan suara 661 ribu per suara dikali lima ribu itu merupakan anggaran pertahunnya yang dikeluarkan kesbangpol. Anggaran dipartai PKS digunakan untuk kegiatan kepemudaan seperti workshop digital setiap tahunnya dan kepentingan partai lainnya. Partai PKS mewadahi mahasiswa dengan program magang di RI sebagai Humas.

Partai ini memiliki peran penting dalam dunia politik Indonesia dan menghargai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi dasar ideologi partai dan mengarah dalam menjaga nilai-nilai seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PKS juga membumikan Pancasila dalam partai politik dan mengutamakan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. PKS memiliki struktur organisasi yang berperan penting dalam mengelola kampanye dan pencalonan dalam setiap pemilihan umum di Indonesia. PKS juga memiliki hak untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden serta menjalin koalisi dengan partai politik lain untuk mencapai dukungan mayoritas.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai politik di Indonesia yang mengusung nilai-nilai Pancasila dalam program dan kebijakannya. PKS memandang bahwa penerapan nilai-nilai luhur Pancasila merupakan kunci terwujudnya Indonesia yang sejahtera, adil, dan jujur.

PKS berkomitmen untuk mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam politik dan memastikan bahwa proses pemilu dilakukan dengan transparansi, akurat, dan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memilih pemilih yang akan mewakili mereka. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia bertujuan untuk menjaga dan memperluas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

PKS merupakan partai Islam yang mampu bersaing dan terus meningkatkan kualitasnya hingga bisa melampaui partai-partai Islam lain yang terlebih dahulu. Komunikasi dalam suatu partai dilakukan secara searah agar mendapatkan hasil dan pemahaman yang sama sehingga tidak terjadinya perpecahan dalam partai. Komunikasi yang baik akan menghasilkan sebuah partai yang baik. Komunikasi dalam partai tentu saja berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang negara. Pancasila berperan penting dalam partai politik karena Pancasila menjadi acuan partai untuk menjalankan kinerjanya.

Sebagai partai politik, PKS sendiri tentunya menjamin adanya komunikasi politik dalam setiap aktivitas politik yang dilakukan, baik ideologi politik, debat politik, maupun aksi politik. Aktivitas politik yang dilakukan PKS tidak lepas dari keterbukaan ideologi partai yang diusung partai tersebut saat ini. Pembukaan ideologis ini akan membawa citra baru PKS, yang awalnya eksklusif, kemudian menjadi komprehensif.

Peran Pancasila dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan aspek terpenting yang akan mempengaruhi partai politik tersebut. Dimana bahwa

Pancasila menjadi dasar ideologi partai dan mengarah dalam menjaga nilai-nilai seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tidak hanya itu partai ini juga mengarah dalam penyelenggaraan usaha seperti halnya Pancasila sangat mempengaruhi berbagai cara-cara dalam penyelenggaraan usaha oleh partai ini sendiri, sehingga fokus utama parta ini adalah pada kesejahteraan sosial.

Partai politik berperan penting terutama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui berbagai kelompok, organisasi, dan lembaga. Partisipasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan merupakan unsur utama yang menentukan keberhasilan suatu pemerintahan dalam meningkatkan kualitas politik di masyarakat. Partai politik juga berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan kader partainya, serta melakukan pelatihan terhadap kader-kader partainya. Selain itu, partai politik juga harus menjadi sarana melahirkan pemimpin yang berkualitas dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat. Melalui program pendidikan politik, partai politik berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, keterpihakan dalam konflik umum terbuka, dan keikutsertaan dalam menentukan kebijakan publik.

Partai Keadilan Sejahtera juga mengatur hubungan dengan Pancasila dimana Partai ini menjadi salah satu dari berbagai partai politik yang mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara dan mengatur hubungan dengan Pancasila. Partai Keadilan Sejahtera mengambil Pancasila sebagai dasar negara dan mengadopsi nilai-nilai seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menjadi pilar utama sistem politik nasional Pancasila menjadi pilar utama sistem politik nasional dan dianggap sebagai proses dalam hubungan platform partai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara keseluruhan, Pancasila memiliki peran penting dalam Partai Keadilan Sejahtera dalam menjaga nilai-nilai sosial, menghargai dasar negara, dan mengarah dalam penyelenggaraan usaha serta penyediaan layanan publik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pancasila sangat berperan penting dalam politik di Indonesia. Dikarenakan, politik di Indonesia berlandaskan pada dasar negara yaitu pancasila. Pancasila juga memiliki peran dalam perkembangan disetiap politik yang ada di Indonesia dari era orde lama hingga era reformasi saat ini. Melalui nilai-nilai pancasila tercermin dalam platform dan program partai politik.
2. Partai PKS telah menjalankan peran sebagai partai keadilan sejahtera yang dimana partai ini harus bersikap pro terhadap masyarakat. Contohnya seperti harga kebutuhan pokok semakin naik dan partai ini harus memperjuangkan dengan cara kontribusi dan memberikan data kepada pemerintah bahwa ada beberapa kebijakan yang dianggap kurang tepat dan harus segera dipecahkan serta diperbaiki dengan adil.
3. Partai PKS sudah memenuhi tugas dan wewenangnya sebagai partai yang adil dan sejahtera. Wewenang partai ini fokus kepada legislative, guna pemenuhan unsur dari legislative yaitu sudah terpenuhi seperti controlling, budgeting kepada

pemerintah, di eksekutif sudah dijalankan misalnya mengkritisi anggaran yang tidak pro terhadap rakyat dan lain-lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Della Ardhani, M. U. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Gema Keadilan*, 9(2), 81-92.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.
- Nurussa'adah, E. &. (2017). Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Keterbukaan Ideologi. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 43-52.
- Sagala, C. &. (2022). Implementasi Pancasila di Tahun Politik. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5 (2), 113-126.
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Jurnal Studi Keislaman*, 7(02), 252-261.
- Suaila, A. &. (2019). Menggali kembali peran Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara dalam pembangunan hukum nasional di era global. *Law and Justice*, 4(1), 46-55.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, A. P. (2021). Peran Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wahana Pendidikan Politik guna Mengembangkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn*, 8(01), 1-9.
- Yudanegara, H. F. (2015). Pancasila sebagai filter pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. *Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA*, 8(2).